

KOMUNIKA

Majalah Universitas Terbuka #59 / Oktober 2016

BONUS
SISIPAN
TUTORIAL
Bahan Ajar UT

Skripsi
Pasti Berlalu

• • •
Bertemu
Petani Android

• • •
Belajar di Lyon

Awas
Canting
Digital

ISSN 2089-1385



9 772089 138554

Rp 19.700



Investasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Ake Wihadanto | Dosen FEKON-UT
Vita Elysia | Dosen FMIPA-UT

Besarnya (*magnitude*) dan cakupannya dari investasi infrastruktur dan pengembangan wilayah menarik untuk dibahas. Lazimnya pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi terjadi di wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi (Bank Dunia, 1994). Pemahaman terhadap pentingnya investasi di bidang infrastruktur dibutuhkan oleh para perencana pembangunan wilayah dalam merencanakan penyediaan infrastruktur, sehingga dapat mengambil manfaat yang rinci tentang dampaknya baik secara sektoral maupun sosial.

Apakah yang dimaksud dengan Infrastruktur?

Secara umum infrastruktur merupakan seluruh komponen yang berguna untuk menggerakkan perekonomian dengan memfasilitasi pergerakan dan sirkulasi barang dan manusia, termasuk ide. *The Routledge Dictionary of Economics* (1995) memberikan definisi infrastruktur sebagai fasilitas utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung melalui penyediaan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya. Di Indonesia penggunaan istilah infrastruktur disebut 'sarana dan prasarana' yang merujuk pada sistem fisik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Bank Dunia (1994) membagi infrastruktur menjadi; **(1)** infrastruktur ekonomi, yang merupakan infrastruktur fisik untuk menunjang aktivitas eko-

nomi, meliputi 'publik utilities' (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), pekerjaan umum (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya); **(2)** infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi; **(3)** infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

Teori Pengembangan Wilayah

Terdapat beberapa teori pengembangan wilayah yang mempunyai keterkaitan dengan investasi infrastruktur. Salah satu diantaranya model pertumbuhan 'Harrod-Domar. Dalam model tersebut, secara sederhana, dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan dari GNP ($\Delta Y / Y$) ditentukan oleh rasio tabungan nasional (s) dan rasio *capital output* nasional (k). Dalam hal ini infrastruktur disini termasuk dalam kategori *capital stock* (K). Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan dalam "*capital stock*" termasuk infrastruktur akan berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan

pendekatan tersebut jika investasi langsung terhadap stok modal secara fisik (infrastruktur) berlangsung maka memiliki 2 (dua) efek positif pada pertumbuhan wilayah. **[1]** ketersediaannya harus meningkatkan produktivitas modal fisik dan manusia. **[2]** jika infrastruktur juga berfungsi sebagai faktor input langsung, maka kenaikan investasi yang tinggi harus dapat meningkatkan output wilayah.

Selanjutnya pendekatan Richardson dan Townroe (1986) memperjelas hubungan antara investasi infrastruktur dengan pengembangan wilayah melalui '*teori sebab akibat kumulatif*' (lihat Gambar 1).

Akibat Kumulatif [Richardson dan Townroe, 1986]

Para perencana (*planners*) percaya bahwa untuk mendorong pengembangan wilayah melalui investasi publik dengan mengerjakan kegiatan ekonomi yang dipusatkan di wilayah tertentu. Myrdal (1957) yang menjelaskan menggunakan istilah



↑ **Gambar 1.** Relasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Menurut Teori Sebab

'backwash and spread effect' dan Hirschman (1958) melalui 'Tesis Pembangunan Tidak Seimbang' (*unbalanced growth theory*). Menurut konsep tersebut investasi sebaiknya dilakukan pada sektor terpilih daripada secara serentak di semua sektor ekonomi.

Bagaimana Dampak Infrastruktur Terhadap Pengembangan Wilayah?

Menurut Guild (2000) investasi infrastruktur terhadap produksi ekonomi dan kesejahteraan sosial secara luas diakui dan dianggap potensial memberikan dampak yang positif. Infrastruktur yang lebih baik dapat mendorong pengembangan wilayah dengan meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, meningkatkan skala pengembalian (skala ekonomi), dan memfasilitasi aglomerasi ekonomi.

Guild (2000) membagi hasil telaaahannya berdasarkan studi-studi empiris tentang hubungan antara infrastruktur dan pengembangan wilayah menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

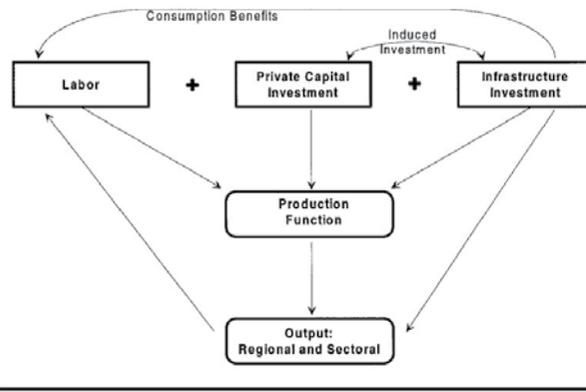
Pertama, dampak terhadap pembangunan sektoral (*sectoral development*). Infrastruktur memberikan kontribusi untuk pembangunan sektoral dengan meningkatkan produktivitas, mampu berinteraksi dengan modal swasta, dan menarik perusahaan (rumah tangga produksi).

Kedua, dampak terhadap pembangunan sosial (*social development*). Berdasarkan perspektif pembangunan sosial, secara teoritis dampak positif tampak pada pertumbuhan melalui peningkatan modal manusia (seperti pendidikan dan kesehatan) yang disebabkan oleh ketersediaan fasilitas (infrastruktur) yang lebih baik. Terdapat 3 (tiga) jenis dampak terhadap pembangunan sosial, sebagai berikut.

a) Pendapatan

Infrastruktur yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas pekerja, sehingga diharapkan upah akan meningkat dan menarik pekerja.

b) Aksesibilitas



↑ **Gambar 2.** Keterkaitan Manfaat dan Output dari Investasi Infrastruktur

Infrastruktur juga harus dapat memajukan pembangunan sosial dengan menyediakan pelayanan yang mempunyai "nilai" kepada masyarakat.

c) Konsumsi

Ketersediaan air bersih, transportasi, sanitasi, dan komunikasi yang langsung dapat dikonsumsi mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Selanjutnya menurut Hansen (1965b) dalam perspektif pengembangan wilayah, dampak yang diharapkan dari investasi infrastruktur dapat bervariasi di setiap wilayah, variasi (perbedaan) yang terjadi biasanya dalam fase (tahapan) pembangunannya. Hansen (1965b) mengklasifikasinya berdasarkan tipologi sebagai berikut:

- **Wilayah padat** ditandai dengan tingginya tingkat aktivitas produktif dibandingkan dengan tingkat infrastruktur.
- **Wilayah menengah** yang ditandai dengan potensi tinggi (misalnya, kepemilikan sumber daya alam) tetapi kekurangan infrastruktur inti.
- **Wilayah tertinggal** ditandai dengan kekurangan modal fisik dan manusia dan dengan demikian kemampuan yang rendah untuk mengeksploitasi sumber daya mereka.

Tesis Hansen (1965a, 1965b) ini dapat menjadi dasar untuk perencanaan untuk menetapkan target dalam investasi infrastruktur dengan memperhatikan tahapan pembangunan termasuk tujuan proyek secara spesifik. Selain mempertimbangkan dampak positif dari investasi infrastruktur,

para perencana sebaiknya juga mempertimbangkan untuk menghitung atau memperkirakan dampak yang ditimbulkan dalam pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan sekitarnya guna meminimalisir munculnya konflik dan permasalahan. Akhirnya para perencana pembangunan dapat mengambil manfaat dari pengetahuan ini. ■

REFERENSI

- Maryati, Sri dan Deliyanto, Bambang. 2013. Buku Materi Pokok Prasarana Wilayah dan Kota PWKL4203 Edisi 1. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka
- Brocker, Johannes and Rietveld, Piet. 2009. Infrastructure and Regional Development. In Capello, Roberta and Nijkamp Peter (eds). Handbook of Regional Growth and Development Theories. Rober. USA: Edward Elgar Publishing Inc.
- Guild, Robert L. 2000. Infrastructure Investment and Interregional Development: Theory, Evidence, and Implications for Planning, dalam Jurnal Public Works Management Policy 2000; 4; 27.
- Hansen, N. M. 1965a. The structure and determinants of local public investment expenditures. Review of Economics and Statistics, 45, 150-162.
- Hansen, N. M. 1965b. Unbalanced growth and regional development. Western Economic Journal, 4, 3-14.
- Haughwout, A. F. 2002. "Public Infrastructure Investments, Productivity and Welfare in Fixed Geographic Areas." Journal of Public Economics 83(3): 405-428.
- Rainer, George. 1990. Understanding Infrastruktur: A Guide For Architects and Planner. USA: John Wiley and Soons Inc.
- Richardson, H. W., & Townroe, P. M. 1986. Regional policies in developing countries. Handbook of regional and urban economics. Amsterdam, the Netherlands: Elsevier.